

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* DENGAN METODE CAMEL

ANDRIANI SYOFYAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: andriani.syofyan@yahoo.co.id

ERVINA

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail: ervinavivin93@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This study aims to determine the level of health KJKS BMT Padang City, especially KJKS BMT Kelurahan Batuanga Taba, KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, and KJKS BMT Village Kubu Parak Karakah by using CAMEL method. This study uses a quantitative approach supported by the use of descriptive statistical analysis. The method used is CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity). This method contains the steps assessed by calculating the magnitude of each ratio on the components. The goal is to simplify the information that describes the relationship between these components so that information can be obtained quickly and accurately. This is absolutely done because CAMEL method is only oriented to the financial statements only, so it is known how the level of health owned by each KJKS BMT. The results of this study indicate in general can be concluded that the assessment of health level KJKS BMT Padang with CAMEL method is in a fairly healthy condition. Where of the three KJKS BMT Padang city studied two is in a fairly healthy position even though one in healthy condition.

Keywords: BMT, Financial Health, Sharia Financial Services

PENDAHULUAN

Krisis Moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 38,39 juta dan 16,5 juta atau 43% penduduk miskin adalah fakir miskin. Selain berdampak terhadap tingkat kemiskinan, ternyata krisis moneter memperlihatkan hal yang menarik mengenai sektor perekonomian di Indonesia, khususnya sektor perekonomian mikro. Sebagaimana data Menteri koperasi setelah krisis ekonomi, menunjukkan dari 42,452 juta *entitas* usaha, ternyata 41,8 juta atau 98,5% adalah usaha

mikro. Hanya 650 ribu yang termasuk usaha kecil dan menengah, serta dua ribu lainnya adalah usaha besar. Ini membuktikan sektor usaha mikro dan UKM-lah yang paling berjasa dalam penyelamatan perekonomian, terutama dalam pengetasan kemiskinan dan pengangguran. (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

Disamping itu ternyata Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan

yang cukup potensial mengingat sebagai besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan.

Salah satu LKM yang berkembang di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu usaha berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya dalam melaksanakan usaha badan usaha koperasi senantiasa mejunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota) dalam semua kegiatan usahanya (Hamid, 2008:62).

Masyarakat kecil sebagai pelaku usaha mikro mengalami kendala dengan faktor permodal untuk memulai usahanya. Oleh karena itu, untuk pemberdayaan usaha mikro, masyarakat kecil membutuhkan modal usaha dengan persyaratan tidak terlalu sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil, bukan seperti persyaratan yang berlaku pada perbankan. Oleh karena itu, dibutuhkan ada lembaga keuangan yang bisa mengayomi masyarakat kecil agar bisa mendapatkan modal untuk usaha skala mikro. Lembaga keuangan yang cocok dengan masyarakat kecil di antaranya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), karena BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Syariah (LKMS) lebih cocok dengan keadaan masyarakat kecil. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip hukum Islam (Huda, 2010:363).

Dalam rangka itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menggalakkan program koperasi yang menyediakan kemudahan akses modal kepada masyarakat miskin. Melihat perkembangan perkembangan lembaga keuangan Islam, pemerintah pun mendirikan lembaga keuangan mikro syari'ah yang disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) yaitu koperasi dengan prinsip syari'ah yang disebut dengan KJKS BMT. Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang setiap saat atau secara berkala perlu melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan tersebut (Rivai, 2010:846).

Demikian pula halnya BMT yang selain untuk kepentingan manajemen sebagai upaya mengetahui kondisi usaha saat ini dan sekaligus memudahkan dalam menentukan kebijakan bisnisnya untuk masa yang akan datang. Hal ini mutlak dilakukan agar lembaga keuangan mikro syariah terhindar dari ancaman likuidasi. Penilaian kesehatan BMT dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek Jasadiyah yang terdiri dari kinerja

keuangan dan kelembagaan serta manajemen, dan pada aspek Ruhiyah yang terdiri dari visi misi, kepekaan sosial, rasa memiliki yang kuat dan pelaksanaan prinsip-prinsip sosial. Penilaian tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan dapat diukur dengan menggunakan satu alat analisis yaitu analisis CAMEL, singkatan dari beberapa faktor yang dinilai antara lain : *Capital, Aset, Manajemen, Earning, dan Liquidity* (Harmono, 2011:114-115).

Metode ini berisi langkah-langkah yang dinilai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen. Tujuannya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar komponen tersebut sehingga dapat diperoleh informasi secara cepat dan tepat (Rivai, 2010:848). Hal ini mutlak dilakukan karena metode CAMEL hanya berorientasi pada laporan keuangan saja.

Tabel 1. Aset KJKS BMT Kota Padang Tahun 2014-2015

No	Kecamatan	Jumlah KJKS BMT	Total Aset 2014	Total Aset 2015
1	Lubuk Begalung	15	7,242,105,838	7.832.546.778
2	Padang Selatan	12	4,913,006,558	5.012.598.779
3	Padang Barat	10	4,401,860,809	4.638.023.693
4	Kuranji	9	4,536,076,036	3.846.177.248
5	Padang Timur	10	3,440,352,636	4.816.228.050
6	Lubuk Kilangan	7	2,095,379,403	2.302.702.462
7	Padang Utara	7	695,318,840	898.295.210
8	Pauh	9	1,214,109,341	1.482.060.134
9	Nanggalo	6	754,859,799	1.029.902.064
10	Koto Tangah	13	2,265,357,322	2.473.007.830
11	Bungus Teluk Kabung	6	343,177,758	409.619.277
Total Aset		104	31,901,604,341	34,741,161,525

Sumber: Laporan Akhir Tahun Sekretariat KJKS BMT Kota Padang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan total aset KJKS BMT Kota Padang tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, ini berarti bahwa Kota Padang merupakan salah satu kota yang diuntungkan dengan pertumbuhan BMT. Dimana Sebagian masyarakat yang merupakan pelaku usaha kecil menyukai menggunakan jasa BMT berasaskan syariah Islam dalam rangka perluasan usaha mereka.

Tabel 2. Aset Tertinggi BMT Kota Padang Tahun 2014-2015

No	KJKS BMT	ASET	
		2014	2015
1	Pengambiran Ampalu Nan XX	Rp.1.150.320.669	Rp.1.218.336.633
2	Korong Gadang	Rp.1.068.954.901	Rp.1.188.492.690
3	Batuang Taba	Rp. 857.492.845	Rp.1.107.221.498
4	Padang Besi	Rp.725.315.276	Rp. 821,660,207
5	Parak Karakah	Rp.793,360,088	Rp. 749,602,374

Sumber: Laporan Keuangan KJKS BMT Kota Padang

Tabel diatas merupakan lima KJKS BMT Kota Padang yang memiliki aset tertinggi. Dari lima KJKS BMT Kota Padang tersebut dua diantaranya tidak bersedia untuk diteliti dengan alasan bahwa laporan keuangan merupakan rahasia BMT. Jadi penelitian ini difokuskan pada 3 KJKS yaitu KJKS BMT Batuang Taba, KJKS BMT Padang Besi dan KJKS BMT Parak Karakah.

Analisis tingkat kesehatan ini, sebagaimana yang termuat dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Wharton *High School* dengan judul *Checkup for U.S. Banks: Healthy in Appearance but Weaknesses Remain* (melihat pada Bank U.S.: Sehat dalam Penampilan tapi Masih Punya Kelemahan) (Marstone dalam *Finance and Investment Research Article*). Tulisan ini mengungkapkan bagaimana

perbankan yang ada di Amerika yang dinilai sehat, mampu membayar utang pada negara dan meningkatkan laba, ternyata masih ada kelemahannya. Dalam keadaan ini kesehatan bank hanya bersifat sementara disebabkan bank juga berutang kepada negara untuk memulihkan keuangannya. Namun utang tersebut hanya menutupi kesehatan bank secara jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang bank tetap dibebani utang disertai bunga yang terus menerus bertambah. Apabila bank U.S ini terus mengandalkan pinjaman dari pemerintah untuk memulihkan kesehatan keuangannya maka penilaian sehat ini hanyalah bersifat semu semata. Jadi kemampuan bank U.S untuk melunasi utang kepada negara dan memperbaiki kinerja juga disebabkan modal yang ditimbulkan oleh utang tersebut. Dengan demikian kesehatan yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan sama sekali tidak menjamin terhadap kondisi lembaga sesungguhnya, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi secara tiba-tiba.

LANDASAN TEORI

Analisis CAMEL yaitu singkatan dari beberapa faktor yang dinilai antara lain: *Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity*. Sedangkan metode CAMELS merupakan penambahan faktor dari CAMEL yaitu faktor S (*Sensitivity to market Risk*) untuk melihat sensitivitas terhadap resiko pasar. Berdasarkan pada *Interest Rate Risk Ratio* (IRRR). IRRR bertujuan untuk menunjukkan nilai bunga dalam mengcover biaya bunga yang harus dikeluarkan dengan pendapatan bunga yang dihasilkan (Muhammad, 2000:167).

Analisis CAMEL ini mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007:3).

Dari uraian diatas maka untuk mengukur tingkat bank menggunakan metode CAMEL. Dalam penelitian ini menggunakan metode CAMEL bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antarpos tertentu dengan pos lainnya sehingga dapat menilai secara cepat hubungan antar pos dan membandingkan dengan rasio lain sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat memberikan nilai secara tepat dan cepat. Hal ini diperlukan agar dapat mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko sehingga mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya dan kondisi yang akan datang (Riva'i, 2007:848).

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang/lembaga pengumpul data serta dipublikasikan kepada

masyarakat pengguna data (Sunyoto, 2011:194). Data sekunder yang digunakan berupa Laporan keuangan KJKS BMT Kelurahan Batung Tabu, KJKS BMT Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, KJKS BMT Kelurahan Padang Besi dari tahun 2013 sampai 2015.

Analisis CAMEL digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan lembaga keuangan. Untuk mengolah dokumentasi mengenai data laporan keuangan, akan dilakukan analisis laporan keuangan KJKS BMT Kota Padang untuk menilai tingkat kesehatan dengan menggunakan CAMEL yang terdiri dari Capital, Asset, Manegement, Earning, dan Likuiditas. Hasil perhitungan menggunakan CAMEL juga akan diinterpretasikan, sehingga dapat dibaca oleh semua pihak.

Analisis ini mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dan penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT, yang dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 5 faktor yang terdiri dari:

a. Permodalan (Capital)

Aspek pertama penilaian kesehatan KJKS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR) (Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007:11).

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Modal

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS koperasi. Rumus untuk mencari modal sendiri terhadap total modal sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan

Tabel 3. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Modal

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007

2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS koperasi semakin sehat. Rumus untuk menghitung CAR sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.
- b) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- c) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR

Tabel 4. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
6 - <7	50	5	1,50	
7 - < 8	75	5	3,75	
≥ 8	100	5	5,00	

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/IX/2007

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

- 1) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang pembiayaan. Berikut rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
- b) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 5. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang Pembiayaan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 12	25	10	1,25	0 - < 2,5 Tidak lancar 2,5 - < 5,00 Kurang Lancar 5,00 - < 7,50 Cukup Lancar 7,50 - 10,00 Lancar
9 - 12	50	10	1,50	
5 - 8	75	10	3,75	
< 5	100	10	5,00	

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

- 2) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko.

Berikut rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Jumlah Portopolio beresiko}}{\text{Jumlah Piutang pembiayaan}} \times 100\%$$

Cara menentukan skor:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.

- b) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 6. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 30	25	10	2,50	0 - 1,25 tidak sehat 1,26 - 2,50 kurang sehat 2,51 - 3,75 cukup sehat 3,76 - 5,0 sehat
26 - 30	50	10	5,00	
21 - <26	75	10	7,50	
< 21	100	10	10,00	

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

- 3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Cara menentukan skor:

- a) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- b) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- c) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 7. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio PPAP(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	

60	60	5	3,0
70	70	5	3,5
80	80	5	4,0
90	90	5	4,5
100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

c. Manajemen (*Management*)

Merkusiwati berpendapat bahwa tingkat kesehatan bank berdasar pada aspek manajemen dengan rasio *Net Profit Margin* (NPM). Hal ini berdasar pada seluruh kegiatan manajemen

suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba (Agustianto, 2012:38). *Net Profit Margin* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* atau laba usaha dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari *Net Profit Margin* sebagai berikut (Kasmir, 1990:74):

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100 \%$$

Tabel 8. Tabel Peringkat Faktor Manajemen

Faktor	Peringkat			
	A	B	C	D
Manajemen (<i>Management</i>)	>85% aspek manajemen Terpenuhi Bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi dan pelaksanaan fungsi sosial.	85% > Manajemen Terpenuhi $\geq 70\%$ Bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang memadai, dan/atau atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sedang dan pelaksanaan fungsi sosial.	70% > Manajemen Terpenuhi $\geq 55\%$ Bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, ualitas manajemen risiko yang cukup, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kurang dan pelaksanaan fungsi sosial.	55% > Manajemen Terpenuhi Bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, manajemen risiko yang lemah, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang rendah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Sumber: lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 09/29/2007

d. Efisiensi/Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian efisiensi KJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- 1) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
- 2) Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- 3) Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan

kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007:24)

1) Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$$

- a) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 9. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak efisien
85-100	50	4	2	Kurang efisien
69-84	75	4	3	Cukup efisien
0-68	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

2) Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

- a) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 10. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Asset

Rasio aktiva tetap terhadap Total Asset (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
76 - 100	25	4	1	Tidak Baik
51 - 75	50	4	2	Kurang Baik
26 - 50	75	4	3	Cukup Baik
0 - 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

5) Rasio Efisiensi Staf

$$\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100 \%$$

Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Tabel 11. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Efisiensi Staf

Rasio Efisiensi Staf (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	0,5	Tidak Baik
50-74	50	2	1	Kurang Baik
77-99	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/XI/2007

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu Rasio kas dan Rasio pembiayaan:

1) Rasio Kas

Rumus yang digunakan untuk perhitungan Rasio kas yaitu

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit

50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 12. Perhitungan Penilaian Skor Rasio *Cash Ratio*

Rasio Kas	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Liquid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Liquid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Liquid
(26-34)	100	10	10	Liquid

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/X/2007

2) Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13. Perhitungan Penilaian Skor Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	2,5	Tidak Liquid
51-75	50	5	5	Kurang Liquid
76-100	75	5	7,5	Cukup Liquid
>100	100	5	10	Liquid

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.35.2/Per/M. KUKM/X/2007

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap komponen-komponen CAMEL diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS BMT yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Riva'i, 2011:123).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui kesehatan KJKS BMT Kota Padang dilihat berdasarkan analisis CAMEL. Analisis ini mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dan penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT, yang dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 5 faktor yang terdiri dari Penilaian Permodalan (*Capital*), Kualitas Aktiva (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Efisiensi/ Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*). Sumber: Laporan Akhir Tahun KJKS BMT Kelurahan Batuanga Taba

Analisis Tingkat Kesehatan 3 KJKS BMT Kota Padang

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 5 komponen diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS yang dibagi dalam 4 (empat) golongan

yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data dari laporan keuangan 3 (tiga) KJKS di kota Padang dengan metode CAMEL:

Tabel 14. Hasil Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan 3 KJKS BMT Kota Padang Tahun 2013-2015

Faktor	KJKS BMT Batuang Taba	KJKS BMT Padang Besi	KJKS BMT Parak Karakah
	Skor		
Permodalan	100	100	100
Aktiva	100	100	100
Manajemen	50	50	50
Efisien	66,7	75	69,4
Likuid	96	58	67
Total Skor	413	379	386
Nilai	82,5	76,7	77,2
Predikat	Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Laporan Akhir Tahun KJKS BMT Kelurahan Batuang Taba, Padang Besi, Parak Karakah (Data Diolah)

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dengan melihat laporan keuangan KJKS BMT kota Padang yaitu KJKS BMT Batuang Taba, KJKS BMT Padang Besi dan KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah yaitu neraca dan perhitungan sisa hasil usaha dapat menunjukkan aspek yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas diperoleh tingkat kesehatan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari 3 KJKS BMT yang diteliti diantaranya KJKS BMT Batuang Taba untuk tahun 2013-2015 merupakan BMT yang memiliki tingkat kesehatan yang sehat sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik dengan total skor 413 dan nilai 82,5 dan KJKS BMT Padang Besi untuk tahun 2013-2015 merupakan

BMT yang memiliki tingkat kesehatan yang cukup sehat sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik dengan total skor 383 dan nilai 76,7 terletak antara rentang rasio 66- <81. Sedangkan KJKS BMT Parak Karakah untuk tahun 2013-2015 merupakan BMT yang memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup sehat sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik dengan total skor 386 dan nilai 77,2 terletak antara rentang rasio 66- <81.

Dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT kota Padang dengan metode CAMEL berada pada kondisi yang cukup sehat. Dimana dari tiga KJKS BMT kota Padang yang diteliti 2 diantaranya berada pada posisi cukup sehat meski satu diantaranya dalam kondisi sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2012). Manajemen Permodalan Bank. *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 19 (1).
- Harmono. (2011). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2000). *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Mulyono, Teguh Pudjo. (1990). *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Jakarta: Djambatan.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sunyoto, Danang. (2011). *Riset Bisnis Dengan Analisis Jalur SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.